

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi seseorang dari sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang timbul karena adanya sebuah sengketa dalam hal ini terkait suatu perjanjian yang memiliki potensi penciptakan ketidak pastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam hal ini debitur yang merasa di rugikan atas ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan atas dirinya dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang di perjanjikan. Namun berdasar dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melarang adanya pelaksanaan esksekusi secara sepihak atas kekuasaannya sendiri dan cenderung melanggar hukum, sejalan dengan pasal 18 ayat (1) huruf d yang memberikan himbawan terhadap setiap pelaku usaha dalam melakukan tindakan secara sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran. karena tindakan sepihak dalam hal ini termasuk penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari debitur. Maka apabila dalam hal ini tidak adanya kesepakatan tentang adanya 'cidaera janji' maka harus dibuktikan di pengadilan melalui upaya hukum. Dengan masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan esksekusi sepihak objek jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (Studi Kasus), Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut pasal 195 (1) HIR atau 206 Rbg mutlak di serahkan ke instansi pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) mengikuti prosedur yang sah atau tatacara pelaksanaan yang bener, dengan demikian perlindungan hukum yang di muat dalam pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (4) tentang hak atas perliindung diri serta perlindungan milik atas benda yang berada di bawah kekuasaannya tidak boleh di ambil ahli secara sewenang-wenang dan perlindungan yang telah di jamin juga dalam putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 dan agar dalam hal ini kreditur tidak melakukan penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Eksekusi

ABSTRACT

Legal protection is an effort to protect someone from an arbitrary act that arises because of a dispute in this case related to an agreement that has the potential to create legal uncertainty and protection for the parties in this case the debtor who feels disadvantaged for legal uncertainty. and the absence of protection for himself and the objects that are the object of the agreed fiduciary guarantee. However, based on the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which prohibits the implementation of unilateral executions on its own power and tends to violate the law, in line with article 18 paragraph (1) letter d which provides guidance for every business actor in carrying out unilateral action relating to goods purchased by consumers in installments. because unilateral actions in this case include the withdrawal or execution of the object of fiduciary security without the consent of the debtor. So if in this case there is no agreement regarding the existence of 'breach of promise' then it must be proven in court through legal remedies. The problems studied in this study are how the name of the execution is carried out in accordance with the applicable laws and regulations and how is the legal protection for debtors in the implementation of unilateral execution of fiduciary guarantee objects. This research is a normative juridical research (Case Study), The results of this study state that the execution of the object of fiduciary security according to article 195 (1) HIR or 206 Rbg is absolutely submitted to the first court institution (District Court) following legal procedures or correct implementation procedures Therefore, the legal protection contained in Article 28D paragraph (1), 28G paragraph (1), 28H paragraph (4) regarding the right to personal protection and property protection for objects under their control may not be taken by experts arbitrarily. The authority and protection that has been guaranteed is also in the Constitutional Court's decision number 18/PUU-XVII/2019 and so that in this case the creditor does not unilaterally withdraw the object of the fiduciary guarantee.

Keywords : Legal protection, fiduciary guarantee, execution